

Daftar Pustaka

- Adeliya, Nungky.2017. "Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)". Dalam Jurnal Civic Hukum Vol.2 No.2
- Adam, Yusuf Hilman & Wahidah Agustin Rahayu.2020."Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan APBDes di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun Periode Tahun Anggaran 2014-2019". Dalam Journal Of Governance And Local Politics Vol.2 No.1
- Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Apbdes Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2019.* dalam <https://neglasari.desa.id/desa/upload/dokumen/Anggaran-Pendapatan-dan-Belanja-Desa.pdf>. diakses pada tanggal 19 Juni 2022
- Artha Wulandari, Phaureula & Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Astuti, Elgya & Eva Hany Fanida. 2013."Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2011 Di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)". Dalam e-Journal Vol.1 No. 2
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. dalam <https://www.bpkp.go.id/>. diakses 14 November 2022
- Bastian, Indra.2014. *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Jakarta:Salemba Empat.
- Daton, Darius Beda."Mengawasi Dana Desa". Dalam <https://www.ombudsman.go.id/>. diakses pada 14 November 2022
- Faradhiba, Laily & Nur Diana.2018." Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Kasus Di Desa Banjarsari Kecamatan Bandarkedungmulyo-Jombang". Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi Vol 6 No. 7
- Ghozali, Rozalina & Darma Yanti. 2018. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pada 3 Desa Di Kecamatan Cempaka Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Studi pada Desa Gunung Jati, Desa Kuripan dan Desa Sukaraja)”, dalam Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah’ Aisyiah (APPPTMA)

Halim, Abdul. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

Hanifah, Suci Indah & Sugeng Praptoyo.2015. “Akuntabilitas Dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes)”. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Vol 4 No. 8

Hilman, Yusuf Adam & Wahidah Agustin Rahayu.2020.”Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Apbdes Di Desa Lembah Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiunperiode Tahun Anggaran 2014 –2019”. *Journal of Governance and Local Politics* Vol. 2 No.1

IAI. Pedoman Asistensi Keuangan Desa. dalam http://tempdata.iaiglobal.or.id/files/Doddy%20Setiadi_PEDOMAN%20ASISTENSI%20AKUNTANSI%20DANA%20DESA%20AGUSTUS%202015.pdf. diakses pada 20 Juni 2022

Iqsan.2016.” Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur”. *E-journal Ilmu Pemerintahan* Vol. 4. No.1

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al Quran dan Terjemahannya*. Bandung: PT Syamsil Cipta Media.

Kementrian Desa.2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: BPKP

Mahmudi.2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN

Mardiasmo.2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Mokalu, Ersi Erlita dkk. 2018. “Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Singsingon Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang”. *SampeJurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol 1 No. 1

Moleong, Lexy J. 2021. *Metode Penelitiann Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdarkaya.

Muhammad Luthfi Iznillah, dkk. 2018.” Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Bengkalis”. dalam *Jurnal Akuntansi*, Vol. 7, No. 1

Mukhtar.2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group)

Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam <https://jdih.kedirikab.go.id/download/13?name=peraturan>, diakses pada 16 Oktober 2022

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. dalam <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf>. diakses 18 Juni 2022

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 6. dalam <http://www.keuangedesa.com/wp-content/uploads/2015/04/Permendagri-No-114-Tahun-2014-Tentang-Pedoman-Pembangunan-Desa.pdf> , diakses 19 Juni 2022

Radjikan, dkk. 2021. “Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembinaan Desa (Desa Sidokare Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk)” dalam *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol.1 No.2

Ramadanis dan Muhammad Ahyaruddin.2019.“Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)”. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* Vol.9 No. 1

Rizal dkk.2018. “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2016”. *Jurnal Al-Iqtisad* Vol 1

Sangki, Ardianto Asdi dkk. 2017.“Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)”. *Jurnal Eksekutif* Vol 1 No. 1

Sriwijayanti, Hari. 2018. “Analisis Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Pengelolaan Apbd (Studi Persepsi Pengelola Apbd Skpd Dinas Pemerintah Kota Padang)”. Dalam Jurnal Ekobistek Vol 7 No.1

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Suhariza & Muslim Chaniago.2017. *Hukum Pemerintahan Daerah Setelah Perubahan UUD 1945*. Yogyakarta:Thafa Media.

Sujarweni, Wiratna V.2015. *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa. dalam https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf . diakses pada tanggal 18 Juni 2022

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa Pasal 79 ayat 1. dalam https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf . diakses pada tanggal 18 Juni 2022

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa pasal 3. dalam https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf . diakses pada tanggal 19 Juni 2022

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa pasal 4. dalam https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf . diakses pada tanggal 19 Juni 2022

Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa, pasal 71 ayat 1. dalam https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2014_6.pdf . diakses 19 Juni 2022

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, pasal 8 dalam http://kpk.go.id/gratifikasi/BP/uu_28_1999.pdf, diakses 17 Oktober 2022

Wawansyah, Cendra.2019.” Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) 2017 Di Desa Poto”. Journal Accounting, Financing, & Auditing Vol 1. No. 1

Widjaja, HAW. 2014. *Otonomi Desa merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajagrafindo.

Yuliansyah & Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Jakarta: Salemba Empat.

Yuniarti. Tri.2020. Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2018. *Skripsi*. Tulungagung: IAIN Tulungagung.